

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan *e-Government* Tentang Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Aparatur Provinsi Jawa Barat (SIAP JABAR) khususnya e-KGB di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. komunikasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic-Kenaikan Gaji Berkala* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilihat dari penyampain informasi, kejelasan informasi dan konsistensi penyampain informasi sudah berjalan tapi belum sepenuhnya optimal hal ini di sebabkan kurangnya komunikasi antara fasilitator kepada aparatur penerima KGB belum tersampaikan, yang menyebabkan aparatur kurang mengetahui sebuah kebijakan penggunaan SIAP JABAR khususnya *Electronic-Kenaikan Gaji Berkala*.
2. Sumber Daya Kebijakan *E-Government* Khususnya *Electronic-Kenaikan Gaji Berkala* di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilihat dari staf, kewenangan, fasilitas sudah berjalan tapi belum sepenuhnya optimal. hal ini terdapat kendala dari jaringan internet, update nya Sistem yang mengakibatkan halaman Usulan Kenaikan Gaji Berkala mengalami eror.

3. Disposisi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilihat dari tingkat kepatuhan aparatur dan insentif sudah cukup baik, namun tidak adanya respon dari teknisi SIAP JABAR apabila terjadi masalah pada SIAP JABAR khususnya e-KGB.
4. Struktur birokrasi Kebijakan *E-Government* khususnya *Electronic*-Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dilihat dari *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Fragmentasi* sudah berjalan sepenuhnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mengoptimalkan komunikasi antara fasilitator kepada aparatur penerima KGB sehingga penyampaian informasi dapat tersalurkan dengan jelas supaya implementasi SIAP JABAR khususnya e-KGB tersampaikan dengan jelas.
2. Diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Perlu adanya perbaikan pada jaringan internet dan perawatan Sistem secara rutin supaya tidak terjadi kendala eror sehingga SIAP JABAR Khususnya e-KGB dapat terimplementasikan.

3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan memberikan edukasi terhadap aparat pentingya merespon cepat jika adanya keluhan dari fasilitator hal ini menyangkut sumber daya aparatur dalam kebijakan SIAP JABAR khususnya e-KGB supaya dapat terimplementasikan.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan mempertahankan penyebaran tanggung jawab sehingga tidak terjadinya timpa tindih kekuasaan yang dapat mengakibatkan tidak terimplmentasikannya *Electronic-Kenaikan Gaji Berkala*.